

**INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASI WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus Pengusaha Tahu di Ds. Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo,
Grogol - Sukoharjo)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

Faris Adilla
B200100057

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus
Pengusaha Tahu di Ds. Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo, Grogol - Sukoharjo)**

Yang ditulis oleh:

**Faris Adilla
B200100057**

Penandatanganan berpendapat bahwa Usulan Penelitian tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing


(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE,)

INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

(Studi Kasus Pengusaha Tahu di Ds. Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo, Grogol – Sukoharjo)

Faris Adilla

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 – 719483 Tromol Pos 1 Surakarta 57102

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the interpretation and implications of tax on the taxpayer by the taxpayer SMEs Production Know Karanglo Village, Village Madegondo, Grogol District Sukoharjo. Metode study used qualitative interpretative research. Samples were 5 SMEs Know Madegondo Sukoharjo and attendant tax authorities Sukoharjo Taxation Office. Data was analyzed using a phenomenological approach. The results showed related tax interpretations by the taxpayer Micro, Small and Medium Enterprises in Sukoharjo, it can be concluded that from some informants own understanding and meaning taxes as a liability, are used for general expenses and is based on legislation. This indicates that, they quite understand the substance of the tax. Implications of the tax according to the taxpayer's perspective Micro, Small and Medium Enterprises in Sukoharjo, the taxpayer had no difficulty related what the obligations in particular in financial reporting as a basis for calculating the tax report generation.

Keywords: *Interpretation of Tax, Tax Implications, Tax payers, SMEs.*

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi dan implikasi pajak terhadap wajib pajak menurut wajib pajak UMKM Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif interpretative. Sampel penelitian adalah 5 UMKM Tahu di Madegondo Sukoharjo dan petugas Fiskus Kantor Dinas Perpajakan Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan terkait interpretasi pajak menurut wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa dari sebagian informan sudah memiliki pemahaman dan pemaknaan pajak sebagai suatu kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa, mereka cukup paham terhadap substansi pajak. Implikasi terhadap pajak menurut perspektif wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo, wajib pajak tidak mengalami kesulitan terkait apa yang menjadi kewajibannya khususnya dalam pembuatan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan dalam pembuatan laporan pajak.

Kata kunci: *Interpretasi Pajak, Implikasi Pajak, Wajib Pajak, UMKM.*

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal dan sesuai dengan target yang ditentukan apabila didukung oleh adanya interpretasi dari wajib pajak terkait dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan pemahaman yang baik, sehingga pajak yang dibayarkan bukan merupakan suatu beban, tetapi sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya. Meski demikian, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami apa yang menjadi ketentuan terkait pajak yang ditanggungnya sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan nya.

Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Penetapan pajak dalam prosesnya sering timbul sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, dan bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Untuk menyelesaikan sengketa seperti ini, Undang-undang memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengajukan proses keberatan.

Diberlakukannya sistem penghitungan pajak *self assessment system*, sepertinya menambah kebingungan wajib pajak khususnya UMKM yang notabene masih sederhana dalam pembukuannya dan mayoritas masih melakukan pencatatan. Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa, UMKM masih sederhana dalam hal perlakuan akuntansinya, maka kemungkinan besar terdapat berbagai penafsiran atau penginterpretasian terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian kuantitatif Ekawati dan Radianto (2008) yang melakukan survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini mencoba melakukan pengembangan dengan menganalisis Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode kualitatif.

Terkait interpretasi terhadap berbagai ketentuan terkait kewajiban pajak khususnya wajib pajak UMKM, mampu memberikan dorongan dari wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011), penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011). Perbedaan ini terletak pada periode penelitian, dimana periode penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011), adalah tahun 2012-2013, sedangkan periode penelitian ini yaitu tahun 2013-2014. Selain itu pelaksanaan lokasi penelitian juga berbeda, dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan, maka dalam penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pengambilan UMKM sebagai objek penelitian di daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Karanglo Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol banyak terdapat industri kecil yang berbasis rumah tangga pada produksi tahu, karena sudah menjadi ciri khas dari Kelurahan Madegondo, maka daerah ini oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dijadikan sebagai sentra industri pembuatan tahu di Kabupaten tersebut.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana interpretasi dan implikasi wajib pajak UMKM pembuatan Tahu di Desa Karanglo terhadap pajak.

Dengan demikian akan diketahui tingkat pemahaman Wajib Pajak UKMK Tahu terhadap perpajakan dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Adriani (2006:1), pajak yaitu : “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:1) “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”

b. Fungsi Pajak

Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas (2004:8) mempunyai dua fungsi yakni :

- 1) Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintahan untuk investasi pemerintahan.
- 2) Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.
- 3) Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.
- 4) Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Official Assesment System : adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) Self Assesment System : adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- 3) With Holding System : adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) menyatakan bahwa : Tata cara pemungutan pajak dengan self assesment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2006:27) yang ciri-ciri *Self Assesment System* adalah :

- 1) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- 2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
- 3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku”

Sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajak-pajaknya. Kendala penerapan sistem *self assessment* :

- 1) Kesadaran masyarakat masih rendah,
- 2) Administrasi data perpajakan yang belum memadai sumber daya manusia relative masih rendah sehingga belum dapat menunjang tugas-tugas pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment*.
- d. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:53) kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 3) Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 5) Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2008:54) meliputi:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

- 10) Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.
- 11) Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis.
- 12) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
- 13) Hak mendapatkan insentif perpajakan.

2. Interpretasi dan Intepretasi Pajak

a. Interpretasi Pajak

Interpretasi adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk mengerti tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam (Mudji, 2005). Selain itu, Interpretasi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menarik dan akurat untuk mengungkapkan pemahaman dan pengertian tentang arti dan hubungan antara pihak yang menafsirkan (interpreter) dengan suatu peristiwa (Joko, 2003). Sementara Moleong, (2012) menyatakan bahwa interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

b. Interpretasi Pajak

Terkait interpretasi dan perspektif wajib pajak, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman dari wajib pajak. Menurut Fikriningrum (2012:45) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Sebuah kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rajif (2011) variabel pemahaman, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitian Fikriningrum (2012) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Kepemilikan NPWP.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
- 5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Menurut Hardiningsih (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Perdana, dkk (2012) pemahaman akan kewajiban perpajakan dibagi atas 3 indikator pemahaman, yaitu :

- 1) Pemahaman mengenai pengetahuan umum mengenai pajak penghasilan.
- 2) Pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban pajak.
- 3) Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, pemberian edukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi dan transparansi dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, termasuk didalamnya adalah faktor pemahaman berdasarkan penelitian terdahulu Wijaya (2011). Kepatuhan diukur melalui kategori yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012 yang disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Perspektif Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

b. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar untuk membayar PPh final sebesar 1% dari omzet bulanan, dengan berbagai usaha, diantaranya usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sasaran dari dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah UMKM.

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

- 1) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu : Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh : Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini adalah :

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.
- 2) Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- 3) Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).
- 4) Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 14) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat *post positivisme*.

Metode ini juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi menurut Moleong (2012: 15) merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti *peristiwa* dan *kaitan-kaitannya* terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 2012: 17).

Penelitian ini juga berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007:44 dalam Mutiah.et.al,2011).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Paradigma interpretif memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, dan alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial (Bungin, 2007:46 dalam Mutiah.et.al, 2011).

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan. Selain itu informan juga diminta untuk mengisi kuesioner.

D. Analisa Data

1. Sentra Industri UMKM Tahu di Ds. Karanglo

Usaha kecil tahu Ds. Karanglo Kelurahan Madegondo telah memiliki pabrik pengolahan tahu yang berpusat di Kelurahan Madegondo sebanyak 32 pengusaha. Jenis tahu yang dijual di Kelurahan Sukoharjo adalah Tahu Putih, Tahu Pong dan Tahu Magel.

Tabel 1
Modal UMKM Tahu di Desa. Karanglo

No	Pemilik	Modal
1	Suparman	200.000.000
2	Tri Mulyani	185.310.000
3	Harto Giyo	194.280.000
4	Noto Mulyono	188.250.000
5	Daliman	194.900.000

Sumber : Data hasil olahan, 2014

Tabel 2
Komposisi Harga Tahu Per Masakan

No	Informan	Harga (Rp)		
		Tahu Putih	Tahu Magel	Tahu Pong
1	Suparman	27.000	28.600	30.000
2	Tri Mulyani	27.200	28.800	29.500
3	Harto Giyo	27.500	28.600	30.000
4	Noto Mulyono	27.000	28.500	30.000
5	Daliman	27.000	28.800	29.750

Sumber : Data hasil olahan, 2014

Tabel 3
Pendapatan UMKM Tahu di Desa. Karanglo

No	Pemilik	Modal
1	Suparman	18,750,000
2	Tri Mulyani	18,000,000
3	Harto Giyo	25,080,000
4	Noto Mulyono	21,450,000
5	Daliman	19,200,000

Sumber : Data hasil olahan, 2014

2. Analisis Interpretasi dan Implikasi pajak menurut wajib pajak Pengusaha Tahu di Ds. Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo, Grogol – Sukoharjo)

Terkait interpretasi pajak wajib pajak UMKM produksi tahu di Kabupaten Sukoharjo, dapat dinyatakan bahwa terkait ketertiban administrasi pajak dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik, meski ada juga informan yang menyatakan bahwa mereka belum tertib dalam administrasi pajak yang

mereka lakukan. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa usaha yang mereka jalankan tidak seharusnya terkena pajak, karena hanya usaha rumahan saja.

Pemahaman terhadap definisi atau substansi dari pajak sebagian informan menyatakan sudah memahami terkait definisi atau substansi dari pajak. Diharapkan dapat memberikan implikasi terkait ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Terkait beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak UMKM tahu, informan ada yang merasa keberatan dengan beban pajak yang harus dibayarkan, mereka menganggap bahwa besaran pajak yang harus dibayarkan menjadi beban pengeluaran, sehingga mengurangi pendapatan bersih yang diterimanya.

Adanya wajib pajak yang menyatakan keberatan dengan beban pajak yang dibayarkan perlu adanya suatu negosiasi terkait tarif pajak yang dibebankan. Maka perlu diupayakan adanya Upaya negosiasi wajib pajak UMKM tahu untuk mengurangi beban pajak. Terkait transparansi dan tidaknya pengelolaan hasil pajak, semua informan yang menyatakan sudah transparan.

Adanya kesesuaian antara alokasi pajak UMKM dengan peruntukannya, informan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kesesuaian pajak UMKM dengan peruntukkan yang sebenarnya, apakah untuk pembangunan keseluruhan ataupun untuk membantu perkembangan UMKM di wilayah mereka, sehingga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait peruntukan alokasi pajak UMKM.

Bentuk dan besaran iuran pajak yang telah ditetapkan, sesuai undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya kesesuaian antara pembayaran pajak dengan peraturan yang berlaku akan menjadikan wajib pajak UMKM sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesulitan dalam Penyusunan laporan keuangan untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan. Kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan ini disebabkan karena jenis usaha mereka yang bersifat usaha keluarga, sehingga seringkali mereka tidak menggunakan pembukuan untuk mencatat berbagai sektor baik pemasukan maupun pengeluaran.

Upaya mengatasi kesulitan menyusun laporan keuangan untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan. Untuk mengatasi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak UMKM usaha tahu di Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diadakan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, misal dengan melakukan diskusi dengan sesama wajib pajak UMKM maupun meminta petunjuk petugas pajak.

Ketaatan membayar pajak penghasilan (pribadi atau badan), dan pajak-pajak lainnya baik pajak pusat maupun pajak daerah sudah baik, UMKM juga wajib membayar pajak-pajak lainnya baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Implikasi positif dan negatif dari adanya kewajiban membayar pajak bahwa implikasi positif lebih besar dari pada implikasi negatifnya dengan adanya kewajiban membayar pajak, sementara satu informan menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak memberikan implikasi yang negatif.

Wajib Pajak UMKM Produksi Tahu di Kabupaten Sukoharjo merasa kerepotan terhadap implikasi terkait kewajiban sebagai Wajib Pajak. Kesulitan tersebut disebabkan karena informan tidak mempunyai waktu karena kesibukan kerja mereka. Sedang terkait kebijakan perpajakan, administrasi serta kinerja daripada fiskus berpengaruh terhadap ketaatan dalam membayar pajak. Karena dari ketiga hal tersebut semuanya akan memberikan dampak yang positif bagi ketaatan dalam pembayaran pajak UMKM.

Demikian pula halnya dengan interpretasi pajak menurut petugas pajak (fiskus) pada KPP Kabupaten Sukoharjo, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak UMKM sudah berjalan dengan berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari tertibnya administrasi dalam pembayaran pajak sesuai sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait tujuan diadakannya ekstensifikasi pajak tahun 2013 bagi UMKM salah satunya adalah agar UMKM mendapatkan NPWP. Bahwa ekstensifikasi pajak tahun 2013, salah satu diantaranya adalah ditujukan agar UMKM memiliki NPWP, sehingga mudah dalam pendataan terhadap UMKM yang menjadi wajib pajak, dimana pada akhirnya akan menambah pemasukan pajak dari sektor UMKM.

Terkait upaya untuk menjaring wajib pajak dari sektor UMKM, petugas juga telah melaksanakan sosialisasi, mengingat cara tersebut merupakan cara yang paling disukai oleh wajib pajak UMKM. Meski demikian petugas masih merasakan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi wajib pajak UMKM Sulitnya melakukan identifikasi terhadap wajib pajak UMKM disebabkan oleh faktor dari UMKM sendiri yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan juga kinerja petugas fiskus dalam mendata atau menjaring wajib pajak dari UMKM.

Untuk itu KPP Sukoharjo perlu untuk bersikap lebih proaktif guna meningkatkan pemasukan daerah dari sektor pajak sangat dipengaruhi oleh sikap proaktif dari petugas pajak, baik dalam mengidentifikasi dan mendata wajib pajak baru UMKM maupun sikap proaktif yang lain, seperti pemberian layanan antar jemput.

Hasil penelitian terkait implikasi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif.

Berkaitan dengan upaya ekstensifikasi pajak yang berjalan belum maksimal, maka implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih agresif menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk berjalan bersama-sama demi suksesnya upaya ekstensifikasi. Karena secara fungsi, Dinas

Koperasi dan UMKM merupakan Instansi Pemerintah yang sedikit banyak mengetahui seluk beluk objek yang dinaunginya.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu 2013 terhadap UMKM yang mendapatkan nomor pokok wajib pajak dilakukan dalam kurun waktu 2013 terhadap UMKM yang mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Berbagai upaya ekstensifikasi telah dilakukan oleh petugas Pajak Kantor Pajak Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap wajib pajak dari UMKM, misalnya dengan mengadakan berbagai macam sosialisasi dengan mengundang pemilik UMKM khususnya mereka yang baru terdaftar. Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya pengetahuan dari wajib pajak UMKM yang baru terdaftar, mereka dapat mengetahui berbagai hal terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Upaya lain yang dilakukan oleh Kantor Pajak Kabupaten Sukoharjo dalam upayanya meningkatkan pemahaman terhadap wajib pajak dari UMKM adalah dengan melaksanakan seminar. Dalam seminar tersebut disampaikan beberapa hal, seperti pembahasan terkait adanya peraturan yang baru dan bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif bagi warga.

Dalam kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan pemahaman dari wajib pajak UMKM, pihak Kantor Pajak Kabupaten Sukoharjo mengalami banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib terkait ketentuan pajak yang diberlakukan.

Pelaksanaan ekstensifikasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap wajib pajak dari UMKM oleh Kantor Dinas Pajak Kabupaten Sukoharjo, mengalami berbagai kendala. Untuk mengatasinya pihak Kantor Dinas Perpajakan telah melakukan beberapa upaya, misalnya dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu pihak Dinas juga menyampaikan pemberitahuan lewat surat kepada wajib UMKM yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Berbagai upaya tersebut yang paling besar pengaruhnya dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak UMKM adalah dilakukannya konseling secara pribadi. Hal ini secara psikologis akan memberikan dampak bagi wajib pajak UMKM bahwa mereka seakan-akan diperhatikan dengan baik, yang pada akhirnya akan memberikan kesadaran bagi mereka untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan terkait interpretasi pajak menurut wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Produksi Tahu Di Desa Karanglo Kecamatan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa dari semua informan sudah memiliki pemahaman dan pemaknaan pajak sebagai suatu kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa, mereka cukup paham terhadap substansi pajak.

2. Implikasi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Produksi Tahu Di Desa Karanglo Kecamatan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan terkait apa yang menjadi kewajibannya khususnya dalam pembuatan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan dalam pembuatan laporan pajak.
3. Interpretasi pajak menurut petugas pajak (fiskus) pada KPP Kabupaten Sukoharjo, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak UMKM sudah berjalan dengan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tertibnya administrasi dalam pembayaran pajak sesuai sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Upaya untuk menjaring wajib pajak dari sektor UMKM, petugas juga telah melaksanakan sosialisasi, petugas fiskus dalam mendata atau menjaring wajib pajak dari UMKM, dengan sikap yang lebih proaktif, seperti pemberian layanan antar jemput.

Daftar Pustaka

- Andriani, P.J.A. 2006. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press. Jakarta.
- Brotodihardjo R. Santoso, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Rafika Aditama; Bandung.
- Ekawati, Liana dan Radianto, Wirawan Endro Dwi. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus September.
- Erly Suandi. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Unikom: Bandung.
- Fidel. 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta
- Mohammad Zain, 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musyafa'ah. *Study Komparatif Pencatatan Akuntansi Sesuai Etap Dengan Pencatatan Umkm Di Sidoarjo*.
- Mutiah et.al. 2011. *Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Persesektif Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, 22 Juli 2011.
- Prianti, Winda. *Peran Fiskus Dalam Membangun Pemahaman Kewajiban Perpajakan*.
- Rapina, dkk. 2011. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Riset Akuntansi, Vol III, Nomor 2*. Jakarta.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit

- Saleh, Novrita. *Interpretasi Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment System Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Gorontalo*.
- Setyaningsih, Titik. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah*.
- Soeroso R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi, Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak; Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur, *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 04 No. 1. 2006
- Yusup, Diniaty. 2011. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh (Survei Pada Perusahaan Kontraktor di Tasikmalaya)*. Skripsi : Universitas Siliwangi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007